

Bekerja di Bawah Stigma: Konstruksi Kelas, Modal Sosial, dan Kerentanan Pekerja Daur Ulang Plastik

Prastyo Bima Aji Anggono¹, Rikasmir², Kenza Aulia Devinta³, Abu Tazid⁴

^{1 2 3 4}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author: akhi.sejati@yahoo.co.id

Abstrak

Pekerja daur ulang plastik memegang peran vital dalam ekonomi sirkular, namun terus terpinggirkan. Artikel ini bertujuan membedah hubungan antara stigma sosial, konstruksi kelas, dan kerentanan pekerja dalam rantai pasok kapitalisme global. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan menyintesis 30 sumber literatur terkait sosiologi dan ekonomi politik persampahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa stigma “pekerja kotor” direproduksi sebagai legitimasi sistemik untuk mempertahankan upah murah dan meniadakan perlindungan kerja. Selain itu, modal sosial pekerja sering kali bersifat ambivalen; alih-alih membebaskan, hal ini justru menjebak mereka dalam sistem patronase pengepul dan ketergantungan ekonomi. Kesimpulannya, transisi ekonomi sirkular tidak akan adil jika hanya berfokus pada teknologi tanpa membongkar ketimpangan kelas. Diperlukan dekonstruksi stigma masyarakat dan rekognisi hukum yang tegas agar pekerja daur ulang diakui sebagai profesional ekologi yang bermartabat.

Kata Kunci: Pekerja Daur Ulang; Stigma Sosial; Konstruksi Kelas; Modal Sosial; Kerentanan Struktural; Ekonomi Sirkular; Kapitalisme Sampah; Pemulung.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan polusi sampah plastik telah menjadi krisis ekologis global yang mendesak, di mana jutaan ton limbah diproduksi setiap tahunnya tanpa infrastruktur daur ulang formal yang memadai (United Nations Environment Programme [UNEP], 2021). Di negara-negara berkembang, kesenjangan infrastruktur ini diisi oleh sektor informal yang menopang sebagian besar rantai pasok daur ulang (Kaza et al., 2018). Namun, di balik perannya yang krusial, ekosistem pengolahan sampah plastik ini melahirkan struktur stratifikasi sosial yang tajam. Secara konseptual, stratifikasi sosial dalam konteks ini didefinisikan sebagai penjenjangan kelas yang hierarkis berdasarkan ketimpangan penguasaan alat produksi, akumulasi modal finansial dan sosial, serta prestise di masyarakat (Weber, 1978; Bourdieu, 1984). Hierarki ini menempatkan

pemulung sebagai kelas bawah yang termarginalisasi, pengepul (pelapak) sebagai kelas menengah perantara, dan korporasi daur ulang sebagai pemegang modal utama di puncak hierarki (Budiarti & Suyanto, 2020).

Kondisi hierarkis tersebut memicu berbagai konflik struktural dan relasional. Konflik utama yang muncul adalah asimetri kekuasaan dalam kontrol sumber daya, di mana fenomena “kapitalisme sampah” mengomodifikasi limbah dan menciptakan eksploitasi tenaga kerja murah (Thieme, 2015; Moore, 2012). Di tingkat akar rumput, konflik mewujud dalam bentuk relasi patron-klien yang eksploitatif; para pemulung sering kali terikat utang budi dan finansial kepada pengepul, memaksa mereka menjual plastik dengan harga yang ditekan secara sepihak (Anam & Rahardjo, 2021).

Implikasi dari konflik dan ketimpangan ini sangat merugikan kelas pekerja bawah. Para pemulung menghadapi kerentanan berlapis: mereka terjebak dalam kemiskinan struktural, tidak memiliki jaminan perlindungan sosial, dan rentan terhadap risiko kesehatan okupasional yang parah (Chan, 2025; Fitriani & Purnomo, 2020). Lebih jauh, pekerjaan mereka dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai “pekerjaan kotor” (dirty work), yang menghasilkan stigma sosial yang tebal dan menghambat mobilitas sosial vertikal bagi keluarga pekerja (Effendi, 2021; Syahputra, 2022).

Urgensi dari kajian ini berangkat dari dominannya narasi “ekonomi sirkular” oleh pemerintah dan korporasi yang sering kali hanya berfokus pada metrik lingkungan dan keuntungan ekonomi, namun mengaburkan atau bahkan menghapus realitas eksploitasi kelas sosial pekerja informal (Dharmawan & Putri, 2022; International Labour Organization [ILO], 2021). Mengungkap ketimpangan ini sangat krusial untuk memastikan transisi tata kelola lingkungan yang berkeadilan (just transition) (Global Alliance for Incinerator Alternatives [GAIA], 2020).

Untuk membedah kompleksitas tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mensintesis temuan-temuan empiris yang terfragmentasi dari berbagai konteks geografis (lokal maupun global), lalu mengawinkannya dengan teori-teori sosiologi klasik. Dengan demikian, studi pustaka memberikan pisau analisis makro-sosiologis yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar studi kasus tunggal. Sehingga diperoleh berbagai

permasalahan, yaitu Bagaimana stigma masyarakat memengaruhi konstruksi kelas sosial dan kerentanan ekonomi pekerja daur ulang plastik di sektor informal?. Bagaimana modal sosial dimanfaatkan oleh aktor-aktor dalam rantai pasok pengolahan plastik untuk membangun relasi kuasa dan melanggengkan sistem patron-klien?. Dan Apa saja implikasi ketimpangan struktural ini terhadap peluang mobilitas sosial pekerja kelas bawah di tengah wacana ekonomi sirkular modern?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik berbasis studi lapangan yang dirancang untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dengan menggunakan pendekatan fenomenologi melalui penelusuran dan analisis kritis terhadap literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji isu secara konseptual dan lintas disiplin, tanpa harus mengumpulkan data lapangan, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini yang menelaah konstruksi kelas berdasarkan nilai yang berkembang dari pekerja daur ulang plastic.

Data penelitian diperoleh dari 30 artikel jurnal bereputasi terindeks yang membahas topik generasi muda, budaya korupsi, tata kelola publik, nilai integritas, dan gerakan sosial digital. Seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, pembacaan penuh, dan penelusuran sitasi mundur-maju (*backward-forward citation tracking*) hingga mencapai kejenuhan informasi.

C. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Sektor pengelolaan sampah, khususnya daur ulang plastik, telah menjadi salah satu pilar utama dalam wacana ekonomi sirkular dan pelestarian lingkungan global. Namun, ironi terbesar dalam diskursus ini adalah posisi para pekerja informal—pemulung dan pengepul—yang menjadi tulang punggung sistem, namun terus-menerus terpinggirkan. Pembahasan ini mensintesis 30 sumber literatur utama yang menyoroti dimensi sosiologis dan ekonomi politik dari pekerja daur ulang plastik. Tinjauan ini dibagi ke dalam tiga klaster tematik utama. Klaster pertama akan membongkar bagaimana stigma sosial dan konstruksi kelas mereproduksi marginalisasi pekerja daur ulang dalam hierarki masyarakat. Klaster kedua menelisik dinamika ekonomi politik, menganalisis bagaimana kapitalisme global dan rantai pasok mengeksploitasi

kerentanan mereka secara struktural. Klaster ketiga mengeksplorasi strategi bertahan hidup, modal sosial, dan potensi agensi pekerja melalui integrasi ekonomi sirkular. Dengan memetakan temuan-temuan ini, pembahasan ini bertujuan untuk mengurai benang kusut antara diskriminasi sosial yang dialami pekerja dan kontribusi vital mereka, serta mengidentifikasi celah riset yang perlu dijawab di masa depan.

Stigma, Konstruksi Sosial, dan Stratifikasi Kelas (Sumber 1, 2, 7, 8, 16, 24, 28, 29, 30)

Klaster pertama ini membahas bagaimana masyarakat mengonstruksi identitas pekerja daur ulang plastik melalui lensa stigma dan pelabelan, yang berdampak pada posisi kelas dan akses mereka terhadap sumber daya.

Secara teoretis, Weber dan Bourdieu memberikan fondasi penting mengenai bagaimana kelas sosial tidak hanya dibentuk oleh akses ekonomi, tetapi juga oleh “kehormatan status” (*status honor*) dan “distingsi” budaya. Dalam konteks pekerja sampah, ketiadaan modal budaya dan legitimasi sosial ini menempatkan mereka di struktur terbawah masyarakat. Temuan ini dikontekstualisasikan secara empiris oleh Effendi dan Syahputra, yang menyoroti fenomena pelabelan “pekerjaan kotor” (*dirty work*). Kedua studi ini menemukan bahwa pemulung sering kali mengalami proses dehumanisasi; masyarakat memandang mereka bukan sebagai agen ekologis, melainkan sebagai manifestasi dari kotoran dan kemiskinan itu sendiri.

Stigma ini tidak hanya berdampak secara psikologis, tetapi mewujud dalam segregasi spasial dan ketimpangan struktural. Linzner dan Lange menemukan bahwa dinamika urban di negara berkembang sering kali mendorong pekerja informal ke pinggiran kota yang kumuh, menjauhkan mereka dari fasilitas dasar. Hal ini sejalan dengan temuan Fitriani dan Purnomo serta Anam dan Rahardjo, yang menegaskan bahwa marginalisasi spasial ini berkorelasi langsung dengan kesenjangan akses kesehatan dasar dan ketergantungan absolut pada pengepul besar (sistem patronase).

Lebih jauh, literatur dari WIEGO memberikan kontras yang tajam dengan menambahkan dimensi gender, menemukan bahwa pekerja perempuan di sektor daur ulang menanggung beban ganda: subordinasi kelas dan represi patriarki, yang membuat mereka dibayar lebih rendah untuk jenis sampah yang sama dibandingkan laki-laki.

Namun, di tengah narasi marginalisasi ini, Zainal menawarkan temuan yang sedikit berbeda, di mana intervensi inklusi sosial di ruang urban tertentu mulai menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan pekerja kelas menengah-bawah ke dalam sistem kota, meskipun prosesnya masih lambat. Secara kolektif, klaster ini menunjukkan bahwa kerentanan pekerja daur ulang bukanlah kondisi alamiah, melainkan produk dari konstruksi sosial yang secara aktif mendepresiasi nilai manusiawi dari pekerjaan mereka.

Eksploitasi Kapitalisme, Rantai Pasok, dan Kebijakan Pengelolaan Sampah (Sumber 3, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25)

Klaster kedua menempatkan pekerja daur ulang plastik dalam analisis makro-struktural, menyoroti bagaimana rantai pasok global dan kapitalisme sampah mereproduksi kemiskinan mereka.

Fondasi kritik dalam klaster ini berakar pada teori eksploitasi Marx, di mana nilai lebih (surplus value) yang diciptakan oleh kelas pekerja diakumulasi oleh para pemilik modal. Dalam konteks modern, Thieme dan Moore menerapkan lensa “kapitalisme sampah” (*garbage capitalism*), menemukan bahwa korporasi multinasional secara sistematis memanfaatkan tenaga kerja murah dari pemulung di Global Selatan untuk mendapatkan bahan baku daur ulang dengan harga yang sangat ditekan. Samson dan Haryanto memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kemiskinan pemulung bersifat struktural; mereka secara sengaja dipertahankan dalam kondisi rentan dan tidak diakui status ketenagakerjaannya agar rantai pasok industri plastik tetap murah dan menguntungkan.

Laporan global dari Kaza et al. dan GAIA memotret ketimpangan kekuasaan ini dalam skala makro, di mana manajemen persampahan sering kali diprivatisasi dan diarahkan pada teknologi padat modal seperti insinerator, yang justru mengancam mata pencaharian jutaan pekerja informal. Medina memberikan komparasi historis yang menunjukkan bahwa meskipun pemulung (*scavengers*) mensubsidi pengelolaan lingkungan perkotaan secara signifikan, kebijakan pemerintah sering kali bersifat represif alih-alih suportif.

Hal ini dielaborasi lebih lanjut dalam kebijakan domestik. Budiarti dan Suyanto serta Setyowati secara kritis membandingkan tata kelola sampah plastik. Mereka

menemukan bahwa kebijakan tata kelola persampahan (*governance*) sering kali memihak pada kepentingan elit dan perusahaan multinasional, sementara pekerja informal hanya dijadikan objek regulasi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kesimpulan dari klaster ini adalah kerentanan pekerja daur ulang tidak semata-mata diakibatkan oleh kurangnya keterampilan, tetapi merupakan desain sistemik dari ekonomi politik persampahan global yang ekstraktif.

Modal Sosial, Ekonomi Sirkular, dan Strategi Resiliensi (Sumber 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 27)

Klaster ketiga mengeksplorasi agensi, perlawanan, dan kapasitas pekerja daur ulang plastik dalam bertahan hidup, terutama di tengah transisi global menuju paradigma ekonomi sirkular.

Meskipun tertekan secara struktural, para pekerja tidak pasif. Cahyono dan Setyowati serta Gunawan dan Hadi menemukan bahwa modal sosial—dalam bentuk jaringan solidaritas komunal dan institusi lokal seperti Bank Sampah—menjadi mekanisme utama bagi pekerja informal untuk mengurangi risiko ekonomi. Namun, relasi ini sering kali bersifat ambivalen. Dalam banyak kasus patron-klien, modal sosial yang terbentuk justru menciptakan ketergantungan hutang pada pengepul besar, meskipun pada saat yang sama memberikan jaring pengaman finansial darurat. Di sisi lain, Jati menyoroti fenomena baru berupa keterlibatan generasi muda dalam aktivisme lingkungan berbasis bank sampah, yang pelan-pelan mencoba mengubah status sosial pekerjaan ini menjadi lebih bermartabat.

Transisi menuju “ekonomi sirkular” yang dicanangkan oleh lembaga seperti UNEP dan ILO dipandang secara kritis oleh literatur di klaster ini. Rahman dan Dharmawan dan Putri mengonfirmasi bahwa integrasi pekerja informal ke dalam ekonomi sirkular modern memiliki potensi mobilitas sosial. Namun, jika tidak disertai dengan reformasi keadilan sosial, transisi ini justru memperparah ketimpangan karena pekerja kecil kalah bersaing dengan fasilitas daur ulang berbasis teknologi. Lebih buruk lagi, Chan dan Irawan dan Susanti menyoroti bahwa pekerja rentan sering kali menanggung beban ganda berupa risiko penyakit akibat kerja dan ancaman hilangnya mata pencaharian akibat industrialisasi daur ulang.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Samson dan Velis mendokumentasikan munculnya gerakan kolektif di berbagai negara berkembang. Mereka menemukan bahwa pengorganisasian serikat pemulung atau koperasi pekerja menjadi instrumen perlawanan kelas yang efektif untuk menuntut pengakuan dari korporasi dan negara. Klaster ini menunjukkan dinamika yang kompleks: para pekerja berada dalam tarik-ulur antara menjadi sekadar instrumen rantai pasok ekonomi sirkular, atau menjadi agen perubahan ekologis yang berdaulat secara ekonomi.

1. Analisis Kritis dan Kesenjangan Riset

Berdasarkan sintesis terhadap 30 literatur di atas, terdapat beberapa kelemahan kolektif dan kesenjangan teoretis yang signifikan.

Pertama, bias lokasional dan homogenisasi subjek. Sebagian besar studi tentang kapitalisme sampah (seperti) dan laporan global (seperti) masih memperlakukan “pekerja informal” sebagai entitas yang monolitik. Terdapat kekurangan analisis interseksional yang mendalam mengenai bagaimana faktor ras, etnisitas lokal, agama, dan gender (selain yang disinggung secara spesifik oleh) beririsan dengan eksploitasi kelas di lokasi spesifik.

Kedua, kesenjangan dalam literatur tentang disrupsi digital. Mayoritas penelitian (seperti) masih berfokus pada hubungan patron-klien tradisional secara luring. Saat ini, belum banyak studi komprehensif yang mengkaji bagaimana penetrasi aplikasi rintisan (*startup*) manajemen sampah atau platform ekonomi gig (ekonomi berbasis aplikasi) mengubah relasi kuasa dan modal sosial di akar rumput. Apakah teknologi ini mengakhiri eksploitasi pengepul besar, atau sekadar memindahkan kontrol ke tangan algoritma perusahaan teknologi?

Ketiga, limitasi aplikasi teori klasik. Penggunaan teori Marx, Weber, dan Bourdieu sangat kuat dalam membedah eksploitasi dan stigma. Namun, teori-teori Eurosentris ini sering kali gagap menjelaskan pragmatisme yang cair dalam masyarakat komunal di negara berkembang. Hubungan eksploitatif antara bos pengepul dan pemulung sering kali dipandang secara kultural oleh masyarakat lokal sebagai hubungan “bapak-anak” yang penuh kewajiban moral, bukan sekadar antagonisme kelas borjuis-proletar. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pengembangan teori sosiologi dekolonial dalam memandang tata kelola sampah.

2. Implikasi dan Kontribusi

Kehadiran artikel ini memiliki kontribusi dan kebaruan (*novelty*) yang krusial. Setelah menelaah kelemahan dari 30 sumber tersebut, peneliti mengusulkan sebuah “Kerangka Integrasi Sosio-Ekologis Anti-Stigma”.

Kebaruan pertama dari artikel kita adalah menjembatani dikotomi antara kajian sosiologi mikro (stigma masyarakat) dan ekonomi politik makro (rantai pasok global). Artikel ini akan membuktikan bahwa stigma (label “pekerja kotor”) bukanlah sekadar fenomena sosiologis yang berdiri sendiri, melainkan alat legitimasi ekonomi. Pelabelan negatif secara sengaja direproduksi oleh struktur kapitalisme agar upah pemulung tetap bisa ditekan jauh di bawah standar kelayakan kerja, menjustifikasi ketiadaan asuransi kesehatan, dan menghindari tanggung jawab *Extended Producer Responsibility (EPR)* dari perusahaan plastik.

Kebaruan kedua terletak pada reposisi konsep “Modal Sosial”. Alih-alih memandang modal sosial pekerja daur ulang sekadar sebagai alat bertahan hidup yang romantis (seperti yang sering digaungkan dalam literatur ekonomi sirkular umum), artikel kita akan menunjukkan sisi *dark side* dari modal sosial tersebut. Solidaritas dan hutang budi di kalangan pemulung justru sering kali menyegel mereka dalam lingkaran setan kerentanan yang sulit ditembus oleh intervensi kebijakan formal.

Implikasi kebijakan dari studi ini sangat jelas: setiap transisi menuju “Ekonomi Sirkular” akan gagal dan tidak adil (*unjust transition*) apabila negara hanya berfokus pada metrik tonase pengurangan plastik atau pembangunan fasilitas fisik bank sampah, tanpa membongkar konstruksi kelas sosial dan memberikan rekognisi hukum penuh kepada pekerja daur ulang sebagai “Pekerja Lingkungan Hijau” (*Green Environmental Workers*). Pekerjaan daur ulang harus didekonstruksi dari sekadar “cara bertahan hidup orang miskin” menjadi “profesi profesional yang menyelamatkan ekologi perkotaan”.

D. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa kerentanan pekerja daur ulang plastik bukanlah kondisi alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial dan eksploitasi sistemik. Pelabelan “pekerja kotor” dan stigma masyarakat berfungsi sebagai alat legitimasi ekonomi politik untuk melanggengkan upah murah dan meniadakan hak-hak ketenagakerjaan dalam

rantai pasok kapitalisme global. Meskipun para pekerja mengandalkan modal sosial seperti jaringan komunal dan sistem patronase untuk bertahan hidup, mekanisme ini kerap kali menjebak mereka dalam siklus ketergantungan dan hutang budi yang membatasi mobilitas sosial. Transisi menuju ekonomi sirkular tidak akan pernah adil jika hanya berfokus pada inovasi teknologi atau metrik persampahan semata, tanpa membongkar ketimpangan kelas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pengakuan hukum yang tegas dan transformasi perspektif masyarakat sangatlah krusial. Pekerja informal harus direkognisi secara layak bukan sebagai masyarakat kelas bawah, melainkan sebagai aktor profesional dan pahlawan ekologi yang esensial bagi keberlanjutan lingkungan.

1. Saran Teoritis

Pengembangan Pendekatan Dekolonial: Riset sosiologis masa depan disarankan tidak hanya bergantung pada teori kelas klasik (seperti Marx atau Weber) yang cenderung Eurosentris, tetapi mulai mengembangkan lensa sosiologi dekolonial yang dapat menangkap pragmatisme dan nilai kultural komunal di negara berkembang.

Kajian Interseksionalitas yang Lebih Dalam: Diperlukan studi lanjutan yang membedah irisan antara kelas sosial pekerja persampahan dengan variabel lain seperti identitas etnis, agama, usia, dan gender secara spesifik di tingkat lokal.

Analisis Disrupsi Digital: Akademisi perlu segera mengkaji dampak penetrasi aplikasi manajemen sampah (*startup green-tech*) terhadap relasi kuasa, apakah digitalisasi ini membebaskan pemulung dari patronase tradisional atau justru menciptakan bentuk eksploitasi baru berbasis algoritma.

2. Saran Praktis

Rekognisi dan Perlindungan Hukum: Pemerintah pusat dan daerah harus merumuskan kebijakan perlindungan spesifik yang mengakui pekerja daur ulang informal sebagai "Pekerja Lingkungan" formal, sehingga mereka berhak atas jaring pengaman sosial, standar upah, dan asuransi kesehatan (BPJS).

Integrasi Inklusif dalam Sistem Kota: Alih-alih melakukan privatisasi atau menggunakan pendekatan teknokratis yang menyingkirkan pemulung, pemerintah kota (melalui Dinas Lingkungan Hidup) harus mengintegrasikan serikat pekerja atau

koperasi pemulung ke dalam tata kelola fasilitas pengolahan sampah dan Bank Sampah Induk.

Edukasi dan Dekonstruksi Stigma: Diperlukan kampanye publik yang masif dari lembaga negara dan NGO untuk mengubah narasi sosial. Masyarakat harus diedukasi untuk melihat pekerja persampahan sebagai penyedia jasa ekologis yang vital, guna menghapus stigma “pekerjaan kotor” dari pandangan sehari-hari.

Daftar Pustaka

1. Anam, K., & Rahardjo, S. (2021). Marginalisasi pemulung di perkotaan dan hubungan patron-klien pengepul plastik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 26(1), 45–62.
2. Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.
3. Budiarti, T., & Suyanto, B. (2020). Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dan kerentanan sosial pekerja informal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(3), 211–228.
4. Cahyono, E., & Setyowati, R. (2019). Modal sosial dan stratifikasi komunitas pemulung di tempat pembuangan akhir. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(2), 189–201.
5. Chan, S. M. (2025). Unequal burdens: Gendered and socioeconomic dimensions of occupational health among Hong Kong's informal waste pickers. *Healthcare*, 13(6), 683.
6. Dharmawan, A. H., & Putri, R. A. (2022). Transisi ekonomi sirkular dan ketimpangan ekonomi rumah tangga pekerja daur ulang. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(1), 15–30.
7. Effendi, R. (2021). Fenomenologi pekerja kasar: Stigma sosial dan konstruksi masyarakat terhadap pemulung. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 301–318.
8. Fitriani, A., & Purnomo, D. (2020). Stratifikasi sosial pekerja pengolahan limbah dan kesenjangan akses kesehatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(1), 88–105.
9. Global Alliance for Incinerator Alternatives. (2020). Waste pickers and the just transition: Power dynamics in waste management. GAIA.

10. Gunawan, H., & Hadi, S. P. (2018). Aspek sosio-ekologis manajemen sampah plastik berbasis bank sampah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(2), 145–156.
11. Haryanto, S. (2019). Kemiskinan struktural dan perlawanan kelas bawah dalam rantai pasok daur ulang. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 8(1), 22–39.
12. International Labour Organization. (2021). Decent work in the circular economy: Protecting informal waste workers. ILO Publications.
13. Irawan, B., & Susanti, E. (2021). Ancaman industrialisasi dan kerentanan masyarakat marjinal terhadap risiko lingkungan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(2), 112–128.
14. Jati, W. R. (2022). Keterlibatan generasi muda dalam bank sampah dan perubahan status sosial melalui aktivisme lingkungan. *Jurnal Studi Pemuda*, 11(1), 55–70.
15. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050. World Bank.
16. Linzner, R., & Lange, U. (2013). Urban dynamics and the spatial-social segregation of informal waste workers in developing countries. *Habitat International*, 41, 69–76.
17. Marx, K. (1867). *Capital: Critique of political economy* (Vol. 1). Charles H. Kerr & Company.
18. Medina, M. (2007). *The world's scavengers: Salvaging for sustainable consumption and production*. AltaMira Press.
19. Moore, S. A. (2012). Global capitalism and the informal waste sector: Power relations in the plastic supply chain. *World Development*, 40(10), 2050–2062.
20. Rahman, M. (2020). Integrating waste pickers into modern circular economy systems and its implications for social mobility. *Resources, Conservation and Recycling*, 155, 104652.
21. Samson, M. (Ed.). (2012). *Reclaiming the global environment: Capitalism and the politics of waste*. Palgrave Macmillan.
22. Samson, M. (2015). Social organization at the dumpsite and collective efforts against class oppression by corporations. *Environment and Urbanization*, 27(2), 81–98.

23. Setyowati, A. B. (2021). Governing plastic waste in the global south: State, multinationals, and local actors. *Society & Natural Resources*, 34(8), 1021–1038.
24. Syahputra, E. (2022). Social stigma, “dirty work” labels, and the marginalization of waste workers in structural health access. *International Journal of Islamic and Humanities Studies*, 2(1), 45–59.
25. Thieme, T. (2015). Garbage capitalism: The commodification of space and the multiple inequalities of recycling workers. *Geoforum*, 67, 75–84.
26. United Nations Environment Programme. (2021). From pollution to solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. UNEP.
27. Velis, C. A. (2017). The informal recycling sector in developing countries: Organizing the waste pickers. *Waste Management*, 65, 1–2.
28. Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Karya asli diterbitkan 1921).
29. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing. (2022). Waste pickers and the informal recycling sector: Gender and class dynamics. WIEGO.
30. Zainal, A. (2023). Social inclusion of waste pickers in urban urbanization: A case study of lower-middle class integration. *Sustainability*, 15(4), 3120.